



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023**

Jl. S. Parman No. 8 B Wonosobo 56311, Telp/Faks. (0286) 321078,
Email: dikpora@wonosobokab.go.id, Website: dikpora.wonosobokab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Upaya peningkatan kualitas SDM tersebut salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, bertugas untuk membantu Bupati Wonosobo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo.

Tantangan yang harus diselesaikan dalam urusan pendidikan adalah menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi semua penduduk di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan berbagai latar belakangnya. Karena sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga menjadi tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk membantu Bupati dalam memberikan akses dan layanan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan.

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga juga masih harus menyelesaikan permasalahan di antaranya prestasi olahraga yang masih terbatas pada cabang olahraga tertentu, sarana dan prasarana olahraga terbatas, prestasi di tingkat nasional dan internasional memerlukan upaya yang lebih besar, partisipasi pemuda dalam pembangunan masih harus didorong lebih kuat dan wirausaha pemuda yang belum tertata dengan baik.

Untuk menyelesaikan tantangan urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2021-2026 dengan berpijak pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2021 -2026, rencana dan juga merujuk Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2024 merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dalam jangka 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan disusun guna merespon program dan kebijakan pemerintah pusat utamanya terkait dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024, dengan tema ***“Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”***.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); (PP 12 th 2019)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1)
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 26);

1.3. Maksud dan tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengukuran kinerja tersebut disusun dengan memperhatikan prioritas daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 serta pagu indikatif belanja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024.

Tujuan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam upaya pencapaian renstra 2021- 2026.
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja tahunan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, secara umum telah mencapai target dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang memerlukan penanganan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan yang masih harus diatasi yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun;
 - b. Masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan; dan
 - e. Belum meratanya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - d. Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
 - e. Masih rendahnya wirausaha pemuda.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta Capaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program dalam bentuk indikator hasil (*outcome*) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan dimasing-masing program dengan mereviu target kinerja capaian program dan realisasi renja pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Untuk mereviu pelaksanaan renja OPD dan capaian renstra SKPD sampai tahun 2022 melalui rekapitulasi dibawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian SKPD sampai dengan 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100,00						100	100
		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100,00						100	100
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00						100	100
		Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100,00						100	100
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100,00						100,00	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100		92,52	Na			100	100
		jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	NA		NA				NA	
		Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36						36	100
		jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12						12	100
		jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan mesin lainnya	12						12	100
		Jumlah paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Dikpora Kab	2						2	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100		100				0
			jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12						0
			Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12						0
			jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12						0
			jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12						0
			Jumlah bulan fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12						0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraiaan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12						
			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3						
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3		103,58		97,95	98,19	3.273
B	Program pengelolaan pendidikan									
			APK PAUD 3-6 tahun	49,9		55,22		49,9	55,84	112

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ paket A	97,95		103,58			97,95	98,19	100
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ paket B	100		100,06			100	90,45	90
		Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A								
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ paket B								
		Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	10,00					10,00	10,00	100
		Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	10,00					10,00	10,00	100
		Persentase sekolah ramah anak	15,00					15,00	15,00	100
		Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	77,77					77,77	77,77	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	76,76				76,76	76,76	100
			PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi	35,24				35,24	35,24	100
			Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	63,83				63,83	63,83	100
			Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	70,07				70,07	70,07	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100,00				100,00	100,00	100
			Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100,00				100,00	100,00	100
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)							
			Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ paket A	100,00					100,00	100
			Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	20,00					20,00	100
			Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95,34					95,34	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)								
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	91,48					91,48	100
			Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	20,00					20,00	100
			Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95,34					95,34	100
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	63,83					63,83	100
			Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	64,50					64,50	100
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	70,07					70,07	100
C	Program Pengembangan Kurikulum									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	20,00					20,00	100
			Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00					100,00	100
			Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00					100,00	100
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00						100,00	100
			Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	50					50	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Guru yang mengikuti diklat Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100					100	100
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	NA					NA	
			Jumlah pendidik yang mengikuti diklatPenyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50					50	100
D	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio kecukupan guru kelas SD	0,97						0,97	100
			Rasio ketercukupan guru SMP	0,89					0,89	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti Seleksi	20					20	100
E		Program Pengendalian perizinan Pendidikan								
			Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	38,89					38,89	100
			Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5,00					5,00	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5,00					5,00	100
		Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	44,44					44,44	100
F	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan									
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	70,00					70,00	100
			Persentase pemuda berprestasi	0,037					0,037	100
			Persentase wirausaha muda	1,68					1,68	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi	0,037						0,037	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%						70%	100
G	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet berprestasi	5,00						5,00	100
		Persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi	62,00						62,00	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	93,00					93,00	100
			Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	3,00					3,00	100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	5,25					5,25	100
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	50					50	100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	93,00					93,00	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Progrm dan Kegitan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	93,00						93,00	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	3,00						3,00	100
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,00						5,00	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	50,00						50,00	100

1) **Program Pengelolaan Pendidikan**

Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas pendidikan, ketercapaian tujuan pendidikan tidak terlepas dari penerapan tata kelola pendidikan yang baik. Program pengelolaan pendidikan bertujuan agar pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan Pendidikan SD.

Usia SD (7-12 Tahun) merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama membangun bangsa. Agar proses ini diperlukan suasana belajar mengajar yang aman, nyaman dan menyenangkan diperlukan sarana prasarana yang memadai, untuk itu pada tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa paket kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengelolaan SD bertujuan untuk menopang aksesibilitas dan partisipasi dan pengembangan potensi peserta didik pada Sekolah Dasar. Oleh karenanya sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai target kinerja pendidikan dasar, khususnya pada jenjang SD. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Pendidikan SD senilai Rp11.003.788.000, digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi dan pembangunan ruang guru/kepala sekolah, rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan, pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif, serta pengadaan TIK Pendidikan dan media pendidikan. Kebijakan DAK Pendidikan Tahun 2022 menekankan pada konsep ketuntasan atau yang dikenal dengan Revitalisasi. Sebagai ilustrasi pada tahun 2022, fokus ketuntasan adalah pemenuhan TIK, sehingga untuk sekolah yang diusulkan belum memiliki TIK diprioritaskan untuk diberikan Alat TIK. Setelah Alat TIK, prioritas diberikan untuk penuntasan berbasis sekolah terutama untuk sekolah yang memiliki kebutuhan rehabilitasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta mendorong daerah untuk bersinergi dalam pemenuhan sarana dan prasarana dengan sumber pendanaan di APBD. Terdapat 20 SD yang mendapatkan alokasi DAK prasarana pendidikan, 1 (satu) SD yaitu SD Negeri Kapencar mendapat TIK pendidikan dan 28 SD mendapatkan media pendidikan.

Untuk menambah daya tampung dan meningkatkan kenyamanan pembelajaran, dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Rp 1.959.000.000 digunakan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru pada 4 MI dan 6 SD, dengan serapan anggaran mencapai 99,2 % dan pembangunan fisik selesai 100%.

Agar pelaksanaan proses pelayanan pendidikan pada MI Rifaiyah Dalangan terlaksana dengan baik, dibangun Ruang Guru dengan anggaran Rp200.000.000 dan terserap Rp188.000.498,-.

Salah satu upaya untuk mewujudkan SDM berkualitas adalah melalui peningkatan derajat kesehatan anak usia sekolah melalui aktivitas Sekolah Sehat. Kampanye Sekolah Sehat dikuatkan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas berkarakter. Komponen Sekolah Sehat meliputi Trias UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.), Stratifikasi Usaha Kesehatan (UKS) dan Prasarana dan Sarana UKS. Untuk mendukung pemenuhan prasarana dan sarana UKS hal tersebut, dibangun ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), bersumber dari DAK dan DAU pada 14 SD dengan total serapan anggaran Rp2.011.762.910 (97,32%). Diharapkan dengan pembangunan ruang UKS maka satuan pendidikan akan semakin termotivasi untuk mewujudkan sekolah sehat.

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa. Secara operasional pemanfaatan perpustakaan sekolah ini bisa digunakan oleh siswa, guru,

atau pemakai lainnya sebagai sumber informasi untuk mengembangkan potensi diri meliputi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah, khususnya kualitas siswa, maka perlu dibangun sebuah perpustakaan yang mampu menjadi sumber belajar. Sehingga pada tahun 2022, untuk mendukung minat baca dan kemampuan literasi peserta didik, diselenggarakan pembangunan ruang perpustakaan dengan rincian 5 SD didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu SD N 1 Kayugiyang, SD N 1 Lengkong, SD N 2 Limbangan, SD N 3 Binangung dan SD N 3 Lumajang. Sementara, pembangunan ruang perpustakaan SD N 2 Sedayu, SD N 2 Tambi, SD N 2 Tegeswetan, SDN 3 Gondowulang, SD N 3 Jangkrikan, SD N Jogoyitnan, dan SD N Keseneng bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk peningkatan fungsi perpustakaan, diselenggarakan penyempurnaan ruang perpustakaan pada 6 SD dengan sumber dana APBD, dengan serapan anggaran mencapai 98,16 % dari anggaran senilai Rp620.050.000,00.

Sub kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah merupakan sub kegiatan yang terdiri dari pembangunan prasarana pendidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar sederajat. Anggaran sejumlah Rp8.638.784.000 dapat terserap sebesar Rp8.371.170.270 atau sekitar 97%. Anggaran ini digunakan untuk penataan lingkungan, pembangunan ruang laboratorium komputer, pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya.

33 SD Negeri, MI Ma'arif Klesman, MI Ma'arif Tegalgot dan MI Muhammadiyah Kalikajar dan MI Ma'arif Slukatan mendapatkan alokasi untuk penataan lingkungan untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan madrasah. Adapun MI Ma'arif Tawangsari mendapatkan alokasi untuk penyempurnaan ruang kelas.

Untuk melayani anak berkebutuhan khusus, SD Negeri Kuripan Kecamatan Garung mendapatkan pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif lengkap beserta perabotannya. Ruang ini diperuntukkan sebagai ruang belajar peserta didik disabilitas jika terjadi kendala belajar dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dilaksanakan pada 24 SD Negeri, 1 SD swasta dan 4 MI dengan sumber dana baik dari DAK maupun DAU. Rehabilitasi ruang kelas rusak dilaksanakan untuk meningkatkan kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Rehabilitasi ruang guru bersumber dari DAK senilai Rp303.705.000,00 diselenggarakan di SD N 2 Kaliwiro, SD N 3 Jangkrikan dan SD N Keseneng. Rehabilitasi sedang perpustakaan SD diselenggarakan di SD N Keberengan Mojotengah. Adapun untuk rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah senilai Rp564.838.000,00 terserap 92% dengan lokasi SD N Siwuran, SD N Igirmranak, SDN 2 Gadingsukuh, SD N 2 Bumirejo dan MI Muhammadiyah Besani.

Untuk mendukung literasi digital bagi siswa SD dan mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional secara mandiri, selain dari Dana DAK, 16 SD Negeri dan 6 MI mendapatkan peralatan TIK untuk mendukung pembelajaran dengan dana bersumber dari daerah, yang pengadaannya melalui metode e-purchasing.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terus menerus berupaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara usia 7-12 tahun untuk menempuh pendidikan Sekolah Dasar melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD pada satuan pendidikan negeri. Terdapat 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Untuk memudahkan akses pendaftaran, sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik, mengakomodir pemeliharaan aplikasi PPDB SD Negeri daring. Sehingga orang tua tidak perlu melakukan antrian pendaftaran, tetapi cukup melakukan pendaftaran secara daring dengan mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan.

Keluaran lain dari sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik adalah penyelenggaraan rangkaian Asesmen Nasional pada jenjang SD. Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan asesmen nasional sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pendidikan. Asesmen Nasional yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar. Hasil dari Asesmen Nasional tertuang dalam Rapor Pendidikan yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk memperbaiki proses layanan pembelajaran.

Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dilakukan untuk mendukung prestasi akademik dan non akademik. Jenis perlombaan yang diselenggarakan meliputi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), serta Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI). Cabang yang diperlombakan dalam FLS2N meliputi gambar bercerita, kriya anyam, menyanyi tunggal, pantomim dan seni tari. FL2SN merupakan ajang rutin yang diselenggarakan tiap tahun oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan bersifat berjenjang sampai ke tingkat Nasional. Ajang berjenjang lainnya yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD. Kabupaten Wonosobo mengirimkan perwakilan ke jenjang Provinsi pada cabang pencak silat. Adapun lomba MAPSI yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Agama Islam dan diselenggarakan secara berjenjang sampai tingkat provinsi menampilkan 17 cabang lomba. Anggaran yang terserap untuk sub kegiatan ini sebesar Rp106.430.000,00. dari total anggaran Rp137.300.000,00.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD yang terdiri atas 205 orang. Insentif ini diharapkan dapat membantu dan memberikan motivasi kepada pendidikan dan tenaga kependidikan untuk tetapi berkinerja baik dalam pelayanan pendidikan. Untuk memastikan layanan terhadap pendidik, sub kegiatan Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar digunakan untuk mengembangkan aplikasi kepegawaian, pengelolaan angka kredit bagi guru dan pengawas SD, mendukung penyelenggaraan PTK Prestasi dan Kompetisi Guru Nasional.

Keluaran sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah antara lain adalah fasilitasi Dewan Pendidikan, Lomba Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Workshop Persiapan dan Evaluasi Akreditasi Sekolah. Lomba sekolah sehat diselenggarakan untuk mendukung revitalisasi Usaha Kesehatan. Diharapkan melalui lomba tersebut dapat menstimulasi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah Adiwiyata merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah. Terdapat 8 (delapan) satuan pendidikan yaitu SD N 1 Kalikajar, SD N 1 Kalimendong, MI Ma'arif Kejiwan, SMP Negeri 1 Kertek, SMP Negeri 1 Sapuran, SMP Negeri 3 Kertek, SMP Negeri 3 Kalikajar dan MTs Ma'arif Garung yang telah ditetapkan dan menerima penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tahun 2022-2026.

Program Sekolah Ramah Anak merupakan program yang mendorong satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah satu lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Terdapat

50 satuan pendidikan terdiri dari 25 SD dan 25 SMP yang telah melakukan deklarasi Sekolah Ramah Anak.

Salah satu indikator satuan pendidikan berkinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah dengan adanya akreditasi satuan pendidikan.. Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (self-regulation), dengan maksud agar suatu agar Sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (quality continues improvement). Terdapat 131 SD dan 40 SMP pada tahun 2022 mengikuti re-akreditasi. Total anggaran senilai Rp220.000.000,00 terserap 96,47%.

Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD) yang merupakan DAK Nonfisik bidang Pendidikan yang digunakan untuk mendukung biaya nonpersonal bagi satuan Pendidikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, 460 SD mengelola dana BOS yang diterima untuk pelayanan pendidikan. Total pagu anggaran sebesar Rp60.651.000.000,00 telah disalurkan ke seluruh SD dengan serapan mencapai 98%.

b. Pengelolaan Pendidikan SMP.

Pengelolaan pendidikan SMP diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP terdiri atas 20 (dua puluh) sub kegiatan. Secara umum kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan SMP sederajat. Sehingga pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan dukungan pada pembangunan Ruang Kelas Baru pada MTs Aswaja Burat Kepil, MTs Ma'arif Binaul Akrom Krinjing Watumalang, MTs Nurul Chusna Selomerto, SMP Pelita Al Qur'an Krasak Mojotengah dan SMP N 1 Garung dengan total anggaran sebesar Rp982.500.000,00. Untuk mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp5.998.051.000,00 untuk revitalisasi SMP N 1 Watumalang, SMP N 1 Kepil, SMPN 2 Kepil, SMP N 2 Watumalang. SMP N 1 Watumalang mendapatkan alokasi DAK terbesar yaitu senilai Rp2.339.280.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Laboratorium Komputer, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Rehabilitasi Jamban/Toilet beserta sanitasinya. Mekanisme pengadaan dilakukan melalui lelang konsolidasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP N 2 Selomerto dan SMP N 5 SATAP Kalibawang. Selain itu juga digunakan untuk Pembangunan Laboraturum SMPN 3 SATAP Kejajar dan SMP N 5 SATAP Sapuran. Fasilitas parkir dibangun di SMP N 1 Selomerto dengan anggaran Rp100.000.000,00 sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga satuan pendidikan. Anggaran pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp2.352.500.000,00 terserap Rp2.339.280.000,00 (93%). Anggaran ini digunakan untuk penataan lingkungan di SMP Takhasus Al Qur'an 2 Deroduwur, SMP Darussalam Islamic Boarding School Ngadiono, SMP N 2 Kalibawang, SMP N 2 Wadaslintang, SMP N 3 Kalikajar, SMP N 4 Kalikajar, SMP N 4 Kepil, SMP N 5 SATAP Kalikajar, SMP N 3 Wonosobo, SMP N 4 SATAP Kalibawang, SMPN 4 Kertek, SMP N 2 Kertek, SMP N 1 Wonosobo dan SMP N 3 Kertek. Selain itu SMP N 2 Wonosobo mendapatkan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling dan Satpam. Adapun untuk mendukung lingkungan sekolah

sehat, SMP Alfa Ali Masykur Mojotengah mendapatkan anggaran pembangunan toilet dan sanitasinya.

Untuk mendukung kenyamanan para pendidik, SMP N 1 Kejajar dan SMP N 1 Mojotengah mendapatkan anggaran untuk mendukung Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru. Sedangkan untuk kenyamanan prasarana pendukung literasi buku, dilakukan rehabilitasi atap perpustakaan SMP N 2 Kalikajar.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, sehingga diluncurkan Gerakan Mayo Sekolah. Gerakan ini diselenggarakan dalam rangka mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah. Sebanyak 199 anak terdiri atas 89 anak di sekolah formal dan 110 anak di satuan pendidikan nonformal, mendapatkan beasiswa pendidikan yang digunakan untuk mendukung biaya personil anak tersebut.

Untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran berbasis teknologi MTS Al Maksum Wonosobo, MTS Ma'arif Kejajar, MTs Ma'arif Tieng kejajar dan SMP N 3 Wonosobo mendapatkan pengadaan peralatan TIK. MTs Al Ghazaly Siwatu, dan SMP Islam Wadaslintang mendapatkan paket komputer. Adapun SMP Al Madina, MTs Al Futuhiyyah SMP Darussalam dan SMP Al Fathoniyah mendapatkan paket laptop. Total anggaran sebesar Rp1.330.000.000,00 terserap 98,30 %, dengan metode pengadaan dilakukan melalui e-purchasing.

Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan metode daring. PPDB daring untuk jenjang SMP terdiri dari 4 (empat) jalur yaitu zonasi (50%), afirmasi (15%), perpindahan tugas orang tua (5%) dan sisa nya diberikan pada jalur prestasi (30%). Di samping itu, sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan asesmen nasional jenjang SMP yaitu pelatihan proktor. Selain itu untuk ketepatan penulisan ijazah, diselenggarakan rapat sosialisasi penulisan ijazah. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP merupakan media untuk penyelenggaraan kegiatan ajang prestasi siswa yang meliputi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), serta Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI). Cabang perlombaan FLS2N terdiri atas Festival Kreativitas Tari, Festival Kreativitas Musik Tradisional, Lomba Gitar Duet, Lomba Menyanyi Solo dan Lomba Desain Poster. Cabang yang diperlombakan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional yaitu pencak silat dan karate. Untuk MAPSI terdiri dari 12 cabang.

Sebanyak 238 pendidik dan tenaga kependidikan non ASN SMP diberikan insentif untuk mendukung kinerja. Anggaran yang digunakan untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah digunakan untuk mendukung kinerja 17 (tujuh belas) SMP Negeri Satu Atap diberikan bantuan operasional daerah. Selain itu, untuk memastikan 40 SMP lolos reakreditasi, dilakukan workshop Akreditasi. Workshop ini diselenggarakan untuk membantu satuan pendidikan yang menjadi lokus re akreditasi, mengisi aplikasi SISPENA sesuai dengan kondisinya dan memastikan semua tahapan sesuai dengan situasi satuan pendidikan.

Dana BOS reguler SMP disalurkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening 103 satuan pendidikan. Dana yang telah disalurkan sebesar Rp32. 044.590.000,00 dengan serapan mencapai 97%.

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini diwujudkan dalam kegiatan :

Total anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp20.381.150.000,00 dengan serapan anggaran mencapai Rp 20.246.534.004 atau sebesar 99%. Pagu terbesar diperoleh dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, senilai Rp14.614.200.000,00 yang digunakan untuk operasional 665 PAUD dalam menunjang layanan pembelajaran.

Aktifitas-aktifitas yang menunjang perkembangan anak antara lain, Gebyar Anak Usia Dini dan fasilitasi kegiatan mendongeng diselenggarakan dengan melibatkan anak-

anak usia dini dan lembaga PAUD.

Kualitas layanan PAUD tidak terlepas dari peran pendidik. Sebanyak 100 guru mengikuti Diklat berjenjang guru PAUD. Tema diklat selaras dengan kebijakan Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan angka stunting. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD digunakan untuk melaksanakan fasilitasi bagi GOP TKI dan pemetaan mutu dan akreditasi lembaga PAUD. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, persentase kenaikan lembaga PAUD berakreditasi B menjadi salah satu indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2022 terdapat 6 lembaga PAUD terakreditasi A, 103 lembaga terakreditasi B dan 32 lembaga PAUD terakreditasi C. Sehingga perlu upaya dari berbagai pihak agar semua lembaga PAUD bisa terakreditasi B.

Sebagaimana pendidikan dasar, sarana dan prasarana lembaga PAUD merupakan salah aspek yang pemenuhan layanan PAUD. Anggaran Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp1.328.000.000,00 terserap sebesar Rp1.316.172.000,00 untuk 7 lembaga yaitu KB RA Kartini Gondowulan Kecamatan kepil, PAUD Al Qur'an Saadatul Islam Jamban Kalibeber, RA Fatimatuzzahro Garung, RA Masyitoh Pacarmulyo Leksono, TK Pertiwi Kenjer Kertek, TK Pertiwi Sumberwulan Selomerto, TK Dharmawanita Leksono, TK Kasih Ibu Krakal Dawung Kecamatan Kertek dan TK Pertiwi Dewi Ratih Binangun Kecamatan Watumalang, serta TK Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah.

Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan satuan pendidikan, TK Pertiwi Siwuran Garung mendapatkan pembangunan kantin, TK Pertiwi 3 Tirip Kecamatan Wadaslintang mendapatkan pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dan TK Pertiwi Gumiwang mendapatkan penataan lingkungan. Sementara TK Desa Keseneng mendapatkan penyempurnaan ruang kelas. Lembaga PAUD Al Hidayah Sumberejo. RA Masyitoh mergosari, TK Pertiwi 1 Pungangan, TK Pertiwi Kramatan dan TK ABA Kaliwuluh Kecamatan Kepil mendapatkan anggaran untuk rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD, dengan total anggaran Rp750.000.000,00 dengan serapan anggaran Rp743.891.000,00 (99,19%).

Mebel PAUD didistribusikan ke PAUD Al Ikhlas Desa Siwuran Kecamatan Garung, PAUD Annajah Gemblengan, RA Perwanida, TK Pertiwi Tlogo dan TK Sigedang Kecamatan Kejajar dengan serapan anggaran mencapai 96,39%.

d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan.

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini diwujudkan dalam kegiatan :

Total anggaran pendukung pengelolaan pendidikan nonformal sejumlah Rp10.290.165.000,00 dan terserap Rp10.181.792.346,00 atau 99%.

Bentuk satuan pendidikan Nonformal yang ada di Kabupaten Wonosobo terdiri atas 19 PKBM dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Nonformal SKB. Lembaga tersebut mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan senilai Rp3.329.100.000,00. BOP dimaksud untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.

Sejumlah Rp5.172.500.000,00 dialokasikan untuk mendanai sub Kegiatan Pembangunan gedung/ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/kesetaraan. Anggaran ini digunakan untuk melakukan penyempurnaan/pembangunan ruang pada 27 TPQ dan Madin. Ponpes Sabillillah Yayasan Bina'ul Akrom Sendangsari Garung , Madin Darul Muttaqin Dusun Karangrejo Dempel Kalibawang, PKBM Catur Sakti, TPQ AL Hidayah Dusun Bedali Desa Kuripan Watumalang dan Madin Al Gozali Kumejing dan TPQ Al Huda Dusun Kalimade Desa Karangrejo mendapatkan paket pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan senilai Rp837.500.000,00 dan terserap 99%. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan digunakan

untuk rehabilitasi Ruang Belajar Madin AlIttihad, Tegalsari, Kecamatan Garung, TPQ Tarbiyatul Mumtadiin Dusun Kongsu Desa Bumirejo, Mojotengah dan TPQ Al Muttaqin, Kuripan, Garung.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal, diselenggarakan bintek kurikulum Merdeka, penyusunan soal ujian, dan monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional serta Pekan Olahraga Kesetaraan. Total anggaran sebesar Rp279.440.000,00 terserap 97,70%.

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diselenggarakan untuk mennyelenggarakan kegiatan penguatan data pokok pendidikan kesetaraan dan pembinaan kelembagaan dan manajemen penyelenggara pendidikan kesetaraan. Sub kegiatan ini 100% terselenggara baik fisik maupun keuangan.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Mulai Tahun Ajaran 2022/2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka. Pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 s.d. 2024, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan akan optimal dengan dukungan muatan lokal dan konsep enterpreneur. Sebanyak 100 orang dilatih untuk mengikuti pelatihan entepreneur.

Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2021, nilai numerasi Kabupaten Wonosobo berada pada angka 1,64 (di bawah kompetensi minimum) untuk jenjang SD dan 1, 80 (di bawah kompetensi minimum) untuk jenjang SMP. Sehingga program ini dimanfaatkan untuk melakukan pelatihan numerasi bagi 565 guru jenjang SD dan SMP . Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 terserap Rp144.090.400,00.

Sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada program Pengembangan Kurikulum difokuskan pada implementasi Kurikulum Merdeka. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal diselenggarakan untuk Fasilitasi Implementasi Kurikulum PAUD Tahun 2013 berbasis Loose Part and STEAM dengan peserta sebanyak 100 orang. Sementara pada pendidikan nonformal menyelenggarakan Bimtek Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Kurikulum Merdeka.

3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan total anggaran Rp100.000.000,00 dan terserap Rp85.505.000,00. Anggaran ini digunakan untuk Pelatihan Penulisan Jurnal Pendidikan, Pembekalan Kepala Sekolah, Pemetaan Guru SMP dan fasilitasi Program Guru Penggerak. Dengan semakin berkurangnya tenaga Penilik dan Pamong Belajar, anggaran ini juga digunakan untuk kegiatan rekrutmen penilik dan pamong belajar.

4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan perizinan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerbitkan izin pendirian PAUD yaitu TK Al Akhyar dan Pos PAUD Tunas Bangsa. Untuk lembaga pendidikan nonformal yaitu PKBM An Nidhom dan PKBM Inka. Sedangkan untuk pendirian satuan pendidikan dasar yang diterbitkan izinnya yaitu SD Islam Baitul Mujahdin, SD Tahfidz Sa'adatul Islam, SMP Al-Munawaroh dan SMP Al Islah. Total anggaran untuk program ini sebesar Rp96.250.000.000,00.

5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda yang bermutu dan berprestasi. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.041.000.000,- ini terealisasi sebesar Rp. 1.016.574.010,- atau persentase realisasi anggaran sebesar 97,65%. Program ini dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu a) organisasi; b) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.

a) Kegiatan organisasi

Kegiatan Organisasi Pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi sebanyak 300 siswa, atlet, pemuda, pendidik dan masyarakat; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dengan melakukan workshop wawasan kebangsaan dan bela negara bagi 120 pengurus OSIS; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera untuk pelaksanaan paskibra Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.

b) Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/Kota

Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yakni: peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota yaitu dengan melakukan pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan membuat dan handycraft kepada 70 Pemuda di kecamatan kepil; jambore pemuda dengan ikut serta dalam pelaksanaan jambore pemuda tingkat jawa tengah di solo; Kajian banding penyusunan RAD kepemudaan dilakukan dengan mengikuti kajian banding penyusunan RAD kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo yang diikuti 100 orang; serta sosialisasi Perda Kepemudaan dengan melakukan sosialisasi perda terhadap pemuda dan organisasi yang ada di Kabupaten Wonosobo.

6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan olahraga yang bermutu dan berprestasi. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.360.000.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 12.134.040.640,- atau sebesar 98,17%. Program ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yakni a) kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b) penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota; c) pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota; d) pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; e) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

a) Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, di tahun 2022 telah dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yakni: Sub kegiatan koordinasi,

sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha dengan hasil berupa training of trainer bulu tangkis bagi guru, training of trainer tenis meja bagi guru dan training of trainer taekwondo bagi guru masing-masing diikuti 30 guru; Pada sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yakni dengan hasil berupa pembangunan 1 (satu) mini stadion kelurahan Pagerkukuh dengan anggaran dari Banku; pembangunan 1 (satu) venue gor wonolelo; dan 1 (satu) kegiatan pengadaan prasarana olahraga sepakbola dan volley untuk 16 klub olahraga.

- b) Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2022 kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yakni : Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah sejumlah 3 (tiga) kegiatan yaitu POPDA tingkat Kabupaten, POPDA eks. Karesidenan Kedu dan POPDA Provinsi Jawa Tengah ; Pada sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dilaksanakan dengan memfasilitasi 2 olahraga untuk disabilitas.
- c) Kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2022 melalui sub kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota telah dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet berprestasi Kabupaten/Kota.
- d) Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.
Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan yakni dengan memfasilitasi sejumlah organisasi keolahragaan untuk kegiatan selama tahun 2022
- e) Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
Pada Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di tahun 2022 dilakukan melalui sub kegiatan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi, yaitu berupa pemberdayaan terhadap perkumpulan olahraga rekreasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi yang ada di Kabupaten Wonosobo.

7) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,- atau tercapai 100%. Program ini hanya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan sub kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah dengan memfasilitasi kwarcab.

8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan mendukung kelancaran tugas dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung program ini adalah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; Administrasi Umum Perangkat Daerah ; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), berikut

disampaikan hasil analisis ketercapaian kinerja urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

a. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2022			
		Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian
1	APM SD	92.33	95.79	103.75	Sangat Tinggi
2	APK SD	98.48	97.92	99.43	Sangat Tinggi
3	APM SMP	79.62	77.95	97.90	Sangat Tinggi
4	APK SMP	56.89	47.50	83.49	Tinggi
5	Angka Partisipasi sekolah pendudukusia 13-15 tahun	100.00	106.74	106.74	Sangat Tinggi
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	15.00	6.24	41.60	Sangat Rendah
7	Angka Putus Sekolah SD	13.00	35.68	274.46	Sangat Tinggi
8	Angka Putus Sekolah SMP	20.00	8.83	44.15	Sangat Rendah
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	78.55	73.91	94.09	Sangat Tinggi
10	Angka Kelulusan (AL) SD	77.53	119.81	154.53	Sangat Tinggi
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	69.67	79.08	113.51	Sangat Tinggi
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	72.92	71.51	98.07	Sangat Tinggi
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional Pendidikan	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	20.00	59.33	296.65	Sangat Tinggi
16	Persentase indeksnilai sikap siswa kategori baik	96.59	57.26	59.28	Rendah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2022			
		Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian
17	% PAUD formal yang terakreditasi	65.50	39.24	59.91	Rendah
18	APK PAUD	35.59	32.31	90.78	Tinggi
19	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	25.00	14.52	58.08	Rendah
20	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
21	Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
22	Rasio kecukupan guru kelas SD	0.98	0.63	64.29	Rendah
23	Rasio ketercukupan guru SMP	0.91	1.28	140.66	Sangat Tinggi
24	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	44.44	68.42	153.96	Sangat Tinggi
25	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5.00	22.22	444.40	Sangat Tinggi
26	Persentase organisasi pemuda yang aktif	75%	100%	133,33%	Sangat Tinggi
27	Persentase pemuda berprestasi	0,04%	0,04%	100,00%	Sangat Tinggi
28	Persentase Wirausaha muda	1,8%	22,27%	1231,67%	Sangat Tinggi
29	Persentase cakupan pelatih yang bersertifikat	64%	21,71%	33,92%	Sangat Rendah
30	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	94%	100,00%	106,38%	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2022			
		Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian
31	Persentase atlet berprestasi	30%	5,67%	18,90%	Sangat Rendah
32	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	6%	1,34%	22,33%	Sangat Rendah
33	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,25%	20%	380,95%	Sangat Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mampu melebihi capaian Tahun 2021. Tahun 2021 capaian APK SMP/MTs /Paket B di angka 91,48%, adapun di tahun 2022 mencapai 95, 79%. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan sekolah-sekolah keagamaan mendukung tingginya angka partisipasi kasar SMP sederajat. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Penyebab tingginya APK mungkin disebabkan karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang pernah putus bersekolah, atau pengulangan kelas. Di satu sisi masih terdapat anak yang tidak sekolah yang enggan kembali bersekolah, dan ketika kembali bersekolah usianya sudah melebihi usia sekolah pada pendidikan formal. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama multisektor untuk mendorong masyarakat untuk memasukkan anaknya untuk bersekolah sesuai dengan usianya. Konsep-konsep kesiapan anak dalam bersekolah menjadi faktor penting. Penguatan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal untuk memastikan anak-anak yang usianya sudah lebih usia sekolah dapat tetap melanjutkan sekolah dengan kualitas layanan yang sama dengan pendidikan formal.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Capaian APM SD/MI/Paket A menunjukkan capaian yang sangat tinggi (99,43%). Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah dasar sesuai dengan usia anak semakin meningkat. Capaian APM SMP/MTs/Paket B termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini berarti masyarakat sudah cukup menyadari pentingnya pendidikan SMP bagi anak-anaknya. Namun demikian dibandingkan tahun 2021, APM SMP/MTs/Paket B tahun 2022 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,11% ini dimungkinkan karena kondisi ekonomi keluarga, kurangnya minat untuk bersekolah dan memilih untuk bekerja, serta anak penyandang disabilitas. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung APM SD dan SMP adalah dengan melakukan kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan usulan Program Indonesia Pintar untuk mencegah anak putus sekolah, mengoptimalkan program kesetaraan dan kerjasama multisektor untuk memastikan anak berkebutuhan khusus/disabilitas bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun belum memenuhi harapan. Situasi ini terjadi karena beberapa hal di antaranya bahwa belum semua orang tua menyadari pentingnya PAUD bagi perkembangan anak dan kesiapan belajar. Selain itu, di daerah pedesaan di mana mayoritas orang tua bekerja sebagai petani atau pekerja lainnya, orang tua cenderung untuk tidak mengirimkan anaknya mengikuti PAUD dengan alasan tidak ada yang menemani anak ataupun mengantar dan menemani anak. Bupati Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar. Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan tujuan agar anak mempunyai kesiapan belajar dalam melanjutkan pendidikannya. Diharapkan semua pihak mampu untuk bergotong royong, mendorong masyarakat untuk tergerak memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menggerakkan seluruh elemen untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak pada usia dini, dan hal ini didukung pula dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di mana Angka Partisipasi PAUD menjadi salah satu indikator pelayanan Pemerintah Daerah yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan bagi anak usia dini.

Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani belum cukup memuaskan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meluncurkan Gerakan Mayo Sekolah, yang merupakan gerakan untuk mendukung anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah dengan pemberian beasiswa. . Gerakan Mayo Sekolah merupakan prioritas Kabupaten dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan nantinya akan meningkatkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo. Namun demikian perlu upaya yang lebih komprehensif, mengingat beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, enggan untuk kembali bersekolah. Faktor tersebut antara lain motivasi yang rendah, lingkungan yang kurang suportif, dan kendala akses untuk mencapai satuan pendidikan terutama di satuan pendidikan menengah. Pada faktanya banyak pilihan untuk bersekolah, baik formal, maupun nonformal dan juga sekolah-sekolah keagamaan. Namun demikian hal tersebut belum cukup menarik anak untuk melanjutkan sekolah. Tantangan lain yang dihadapi dalam mengatasi masalah anak tidak sekolah adalah dorongan untuk bekerja yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, menyebabkan orang tua memilih anaknya untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan bersekolah.

Tingkat kesadaran satuan pendidikan untuk menerima Peserta Didik Disabilitas semakin meningkat, tidak hanya pada satuan pendidikan tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan persentase anak dengan disabilitas yang dilayani cukup tinggi. Kendala yang dihadapi antara lain adalah belum semua sekolah melayani anak sesuai dengan kondisinya. Oleh karenanya kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang bertugas menjadi jembatan antara anak disabilitas dengan satuan pendidikan diharapkan dapat mulai mengatasi permasalahan tersebut.

Persentase sekolah ramah anak belum memenuhi target, baru 6,24% satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan sekolah yang aman bagi anak menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dalam mendampingi agar satuan pendidikan aman bagi warga sekolah. Belum tercapainya target pemenuhan sekolah ramah anak dikarenakan adanya overlapping program dengan sasaran/lokus satuan pendidikan (sekolah ramah

anak, sekolah sehat, sekolah adiwiyata) yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi masing-masing program dan terkesan parsial. Perlu upaya dan advokasi untuk memperluas konsep sekolah aman yang mencakup sekolah aman, ramah, sehat, berwawasan lingkungan dan inklusif.

Capaian kinerja untuk sarana dan prasarana SD belum mencapai target. Adapun untuk SD sudah memenuhi target. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, perlu dioptimalkan. Tidak kalah penting, satuan pendidikan perlu memahami pentingnya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala sehingga dapat meminimalisir potensi kerusakan bangunan. Satuan pendidikan juga perlu untuk memahami konsep-konsep sekolah aman bencana, sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap potensi bencana.

Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini mencapai angka 79,09%. Situasi tersebut didukung oleh Kebijakan PPDB SD dengan penggunaan NISN dari siswa TK/RA, mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya di TK/RA., Hanya saja pada sisi lain anggapan orang tua bahwa jenjang PAUD sederajat tidak diperlukan, mendorong orang tua untuk langsung memasukkan anak ke SD. Sehingga terdapat siswa SD yang usianya kurang dari 7 tahun dan belum cukup siap untuk mengikuti pembelajaran. Perlu dilakukan diseminasi pemahaman kepada orang tua mengenai batas minimal usia masuk SD terkait dengan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran melalui kanal-kanal yang ada.

Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 71,51 %, meningkat dibandingkan tahun 2021, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan ini salah satunya karena adanya peluang beasiswa pendidikan bagi anak tidak sekolah yang kembali bersekolah. Kendala utama yang dihadapi adalah Rendahnya minat anak tidak bersekolah untuk kembali bersekolah dengan berbagai latar. Sehingga perlu untuk terus menguatkan kampanye gerakan Mayo Sekolah dengan melibatkan para pihak dan perlu menggandeng masyarakat/CSR untuk mendukung Gerakan Mayo Sekolah

Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dan Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs merupakan indikator SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Penetapan dan penghitungan capaian dilakukan setiap tahun yang ditetapkan dalam anggaran, program dan kegiatan tahunan. Pemenuhan SPM didukung dengan tersedianya kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku paket.

Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan. Kebijakan akreditasi mendorong satuan pendidikan untuk terus memperbaiki layanan pendidikan. Namun demikian, jumlah/alokasi satuan pendidikan yang diakreditasi telah ditentukan oleh lembaga akreditasi Kemdikbudristek, sehingga upaya untuk meningkatkan akreditasi pada semua satuan pendidikan harus menunggu antrian. Perlu dilakukan komunikasi advokasi untuk menambah alokasi satuan pendidikan yang diakreditasi, senyampang dengan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan sehingga akreditasi yang didapatkan nantinya meningkat.

Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kebijakan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengalokasikan kuota peserta PPG untuk setiap kabupaten/kota/provinsi, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah peserta PPG. Pemerintah Kabupaten perlu untuk melakukan koordinasi kepada pihak Kemdikbudristek mengenai opsi PPG mandiri atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru PAUD Formal (TK) yang berkinerja baik mendorong guru-guru TK untuk melanjutkan kuliah. Namun belum seluruh pendidik PAUD Nonformal untuk berminat/termotivasi untuk melanjutkan kuliah S1/D-4 bahkan masih terdapat pendidik PAUD yang berijazah SMP dan terkendala pada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong pendidik untuk melanjutkan pendidikan, melalui skema-skema yang tersedia.

Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi memang belum memenuhi target, namun capaian yang diperoleh sudah tinggi. Diharapkan perubahan kebijakan akreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang semula penilaian dilakukan secara manual dan visitasi lapangan, diubah melalui mekanisme rapor pendidikan, akan mendorong lembaga PAUD untuk terus berupaya memperbaiki kualitas layanan.

Rapor pendidikan adalah Indikator terpilih Dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Salah satu sumber Rapor Pendidikan adalah pelaksanaan Asesmen Nasional yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hasil Rapor pendidikan menunjukkan bahwa literasi sudah cukup mencapai kompetensi minimum. Namun untuk kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum. Belum semua satuan pendidikan memahami strategi peningkatan literasi dan numerasi siswa. Sehingga perlu rumusan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi serta mendukung kebijakan pemerintah pusat seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Perencanaan Berbasis Data)

Rasio kecukupan guru kelas SD masih rendah. Rasio ketercukupan guru SMP sepertinya memang sudah melebihi target dan berlebih. Namun apabila ditelisik lebih jauh, kelebihan guru terjadi di beberapa mata pelajaran, namun di mata pelajaran lain masih kekurangan guru. Diharapkan Kebijakan pemerintah untuk pengangkatan PPPK dengan memprioritaskan guru yang sudah berpengalaman dapat memenuhi kekurangan tersebut.

Satuan pendidikan nonformal yaitu PAUD dan PNF juga wajib memiliki status akreditasi untuk menilai kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Sehingga Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dan melakukan mekanisme pemantauan dan pendampingan kepada satuan pendidikan yang belum terakreditasi.

Pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan terdapat 3 (tiga) indikator yang menentukan keberhasilan capaian kinerjanya yakni persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pemuda berprestasi dan persentase wirausaha muda, dari ke-3 (tiga) indikator tersebut bisa dikatakan berhasil karena status capaiannya semuanya sangat tinggi. Keberhasilan pada indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dari target 75% terealisasi 100% atau capainya sebesar 133,33% Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan yang menjadi pedoman bagi organisasi pemuda untuk berperan

dalam pembangunan di kabupaten Wonosobo, sehingga memperkuat kolaborasi antar sektor yang menangani pemuda dan kepemudaan serta organisasi pemuda.

Pada indikator persentase pemuda berprestasi dengan target 0,04% persentase capaian di akhir tahun 2022 sebesar 100% ketercapaian ini karena semakin banyaknya peluang bagi pemuda untuk mengembangkan/mengoptimalkan minat atau bakat dan potensinya melalui berbagai ajang, selain itu juga tak lepas dari adanya usaha giat membangun ASUH PEMUDA dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah pengelola pemuda dan menjadikan ASUH PEMUDA sebagai bentuk kerja kolaborasi pembangunan pemuda, juga adanya penyusunan pola kemitraan dengan multi pihak dengan skema pola kursus singkat magang pemuda dan per group training.

Indikator Persentase wirausaha muda capaiannya sebesar 1231,67% dari target 1,8 % atau terealisasi 22,27%, hal ini dikarenakan minat berwirausaha pemuda tumbuh pesat karena faktor kemudahan dalam teknologi, namun belum semua pemuda meyakini wirausaha merupakan pilihan profesi, sehingga berdampak pada wirausaha yang tidak long lasting., maka untuk lebih mengoptimalkan kewirausahaan muda pihaknya (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo) melakukan terobosan terobosan dengan mengembangkan Pendidikan kewirausahaan sejak dini di sekolah, selain itu juga menyelenggarakan forum-forum wirausaha muda.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ini didukung oleh empat indikator yakni : persentase cakupan pelatih yang bersertifikat,; persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga; persentase atlet berprestasi; dan persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi.

Berdasarkan capaian empat indikator pada urusan Kepemudaan dan Olahraga hanya ada satu indikator yang status ketercapaiannya sangat tinggi yaitu pada indikator persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga dari target 94% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 106,38% hal ini dikarenakan adanya peran KONI sebagai koordinator dan pembina olahraga yang cukup bagus dalam melakukan terobosan-terobosan penguatan pada cabang-cabang olahraga. Sementara tiga lainnya masing-masing sangat rendah adalah persentase cakupan pelatih yang bersertifikat dari target 64% terealisasi 21,71% atau dengan capaian 33,92% hal ini dikarenakan minimnya pelatih bersertifikasi padahal animo masyarakat untuk menjadi atlet sangat tinggi, untuk mendorong agar semakin banyaknya pelatih yang bersertifikat maka KONI akan didorong untuk menyelenggarakan program pelatih bersertifikat. Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Wonosobo masih sangat rendah dari target 30% hanya terealisasi 5,67% atau tercapai 18,90% hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal padahal minat masyarakat dalam olahraga prestasi semakin meningkat maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mengingat limitasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dari sumber daya manusia, pengelolaan dan anggaran. Sehingga diperlukan strategi kolaborasi dengan prinsip jejaring untuk mendukung pembangunan keolahragaan mengingat minat masyarakat dalam olahraga prestasi semakin meningkat. persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi sangat rendah, ini dapat dilihat dari target 6% hanya terealisasi 1,34% atau capaiannya hanya sebesar 22,33% hal ini dikarenakan pembinaan olahraga rekreasi belum sepenuhnya terarah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga padahal animo masyarakat terhadap olahraga rekreasi sangat meningkat sehingga diperlukan penguatan kelembagaan Komite Olahraga Rekreasi

Masyarakat Indonesia (KORMI) dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga rekreasi.

Pada Proram Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdapat satu indikator yakni persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan dengan status ketercapaian sangat tinggi yaitu capaian 380,95% dari target yang telah dtentunakn 5,25% terealisasi 20% hal ini dikarenakan Pendidikan pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa/pelajar selain itu juga dilakukan penguatan terhadap lembaga kepramukaan guna mengembangkan karakter anak-anak.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Belum terpenuhinya SPM berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan .	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan program/kegiatan dengan prioritas pemenuhan SPM - Melakukan proses adaptasi kebijakan pemerintah pusat terkait pemenuhan SPM yang meliputi program guru penggerak dan sekolah penggerak dan mendorong entitas satuan pendidikan mengikuti program-program dimaksud.
2	Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikburistek merupakan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan, belum sepenuhnya dipahami oleh satuan pendidikan. Hal ini berdampak pada kurangtepatnya intervensi dalam peningkatan kompetensi literasi dan numerasi serta lingkungan sekolah yang inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan semua satuan pendidikan memahami rapor pendidikan dan capaian-capaian yang diperoleh dan dituangkan dalam perencanaan berbasis data dengan sumber dana BOS. - Implementasi “Bebas 3 (tiga) Dosa Besar Pendidikan.
2.	Pendidik PAUD Nonformal, Tutor dan pamong belajar belum seluruhnya memenuhi kualifikasi minimal	Mendorong pendidik PAUD , tutor dan pamong belajar untuk menempuh pendidikan sesuai dengan kualifikasi
3.	Masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa Pendidikan bukan hal yang primer. Hal ini berdampak pada kurangnya minat untuk kembali bersekolah.	Kerjasama multisektor (Antar Perangkat Daerah Terkait, kecamatan, desa) untuk mendorong Anak Tidak Sekolah untuk Kembali bersekolah melalui Gerakan MAYO SEKOLAH.
4.	Masyarakat yang beranggapan kurang pentingnya PAUD berdampak pada kesiapan anak pada saat masuk SD	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan AYO ke PAUD yang didiseminasikan ke seluruh lini masyarakat diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anak usia 5-6 tahun ke PAUD - Penerbitan Peraturan Bupati 6 Nomor Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar

No.	Permasalahan	Solusi
5.	Masih terdapat SMP yang jaraknya cukup jauh dari domisili peserta didik dan tidak ada/minim transportasi umum.	Mendorong pihak desa untuk membantu akses transportasi peserta didik.
6.	Untuk mencukupi kebutuhan guru, daerah tergantung pada formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.	Penyusunan formasi kebutuhan ASN guru secara cermat serta mengadvokasi kekurangan ASN guru.
7	Persentase cakupan pelatih yang bersertifikat sangat rendah	- Bekerjasama dengan KONI dengan memperbanyak kegiatan peningkatan kompetensi pelatih di semua cabang olahraga
8	Persentase atlet berprestasi sangat rendah	Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. dengan prinsip jejaring untuk mendukung pembangunan keolahragaan mengingat minat masyarakat dalam olahraga prestasi semakin meningkat
9	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi sangat rendah	Penguatan kelembagaan KORMI dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga rekreasi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan kasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Nomenklatur tersebut meliputi Program Penunjang urusan pemerintahan daerah, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perijinan sekolah, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan, dan Program Pengembangan Kapasitasitas Daya Saing Keolahragaan. Masing-masing program dibagi dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Pada sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sudah meliputi kegiatan prioritas penunjang tercapainya target indikator yang telah disusun, baik melalui kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			200.000.000	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100				Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100			
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100				Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100			
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100			
	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100				Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100			
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			690.000.000	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			486.622.543.431	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.000.000	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			366.000.000	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			88.500.000	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.500.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.000.000	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			550.000.000	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100.000.000	1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	-	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			250.000.000	1.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.000.000	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			275.000.000	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			125.000.000	1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			829.400.000	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.400.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			75.000.000	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			160.000.000	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.000.000	1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	15.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.000.000	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			500.000.000	1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			3.400.000.000	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	3.400.000.000	
	APK PAUD 3-6 tahun	58,59				APK PAUD 3-6 tahun	58,59			
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ paket A	100,00				Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ paket A	100,00			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ paket B	93,19				Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ paket B	93,19			
	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A	99,48				Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A	99,48			
	Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ paket B	81,21				Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ paket B	81,21			
	Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	30,00				Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	30,00			
	Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	16,00				Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	16,00			
	Persentase sekolah ramah anak	23,00				Persentase sekolah ramah anak	23,00			
	Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	79,33				Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	79,33			
	Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	78,30				Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	78,30			
	PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi	35,95				PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi	35,95			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	73,37				Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	73,37			
	Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	75,20				Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	75,20			
	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100,00				Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100,00			
	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100,00				Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100,00			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.500.000.000	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.500.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			450.000.000	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			4.402.500.000	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.402.500.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			6.870.000.000	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.870.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			8.426.000.000	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.426.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			875.000.000	1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	875.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			250.000.000	1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	250.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			375.000.000	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	375.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			360.000.000	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	360.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			280.000.000	1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	280.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			5.540.000.000	1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.540.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			200.000.000	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150.000.000	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			6.701.100.100	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.717.292.800,00	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			250.000.000	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	250.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			225.000.000	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	125.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			48.153.070.730	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.153.070.730	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150.000.000	1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.300.000.000	1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.300.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			750.000.000	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	750.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			652.500.000	1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	652.500.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150.000.000	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			200.000.000	1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			300.000.000	1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	300.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			200.000.000	1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			2.125.000.000	1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.125.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			8.625.000.000	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.625.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.440.000.000	1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.440.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			170.000.000	1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	170.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.255.000.000	1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.255.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.830.000.000	1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.830.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			135.000.000	1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	135.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			320.000.000	1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	320.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			610.000.000	1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	610.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			750.000.000	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			2.640.000.000	1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.640.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			720.000.000	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	800.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			560.000.000	1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	560.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			200.000.000	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			200.000.000	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			2.319.046.100	1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.795.262.400	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100.000.000	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			580.000.000	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	425.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			29.768.091.600	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.768.091.600	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			60.000.000	1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	60.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.545.000.000	1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.545.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			480.000.000	1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	480.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			175.000.000	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	150.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.000.000	1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	30.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			3.417.600.000	1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.029.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150.000.000	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			180.000.000	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			15.200.000.000	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.200.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			80.000.000	1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	60.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			50.000.000	1.01.02.2.04.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			325.000.000	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	240.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			40.000.000	1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			155.000.000	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			3.329.100.000	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.329.100.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.000.000	1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			60.000.000	1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	60.000.000	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100.000.000	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000	
	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	35,00				Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	35,00			
	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00				Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00			
	Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00				Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100,00			
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100.000.000	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	100.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
								Pendidikan Nonformal		
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			150.000.000	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	150.000.000	
	Rasio kecukupan guru kelas SD	0,99				Rasio kecukupan guru kelas SD	0,99			
	Rasio ketercukupan guru SMP	0,93				Rasio ketercukupan guru SMP	0,93			
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			25.000.000	1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	
	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	50,00				Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	50,00			
	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5,25				Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5,25			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			25.000.000	1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			25.000.000	1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			25.000.000	1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			100.000.000	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	100.000.000	
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,00				Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,00			
	Persentase pemuda berprestasi	0,044				Persentase pemuda berprestasi	0,044			
	Persentase wirausaha muda	1,94				Persentase wirausaha muda	1,94			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			150.000.000	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	200.000.000	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			240.000.000	2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			250.000.000	2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	350.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			400.000.000	2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2.19.02.2.01 Penyiadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	300.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			5.000.000.000	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.000.000.000	
	Persentase atlet berprestasi	5,51				Persentase atlet berprestasi	5,51			
	Persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi	66,00				Persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi	66,00			
	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	95,00				Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	95,00			
	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	10,00				Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	10,00			
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			650.000.000	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			150.000.000	2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	200.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			150.000.000	2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.500.000.000	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			150.000.000	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			30.000.000	2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	50.000.000	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500.000.000	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	
	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,51				Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,51			

Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu validasi	Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana	
			672.403.451.961						668.377.260.961	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan menampung usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023. Kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

3.1.Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

RPJMN Tahun 2020-2024	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	Mewujudkan Indonesia Maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila, yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotomg royong dan berkebhinekaan global
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026	Mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera
Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, Relegius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara fungsional terkait dengan kebijakan nasional, dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan strategi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, dengan melalui 7 (tujuh) program sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Pendidikan
- 2. Program pengembangan kurikulum
- 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 4. Program pengendalian perijinan
- 5. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 6. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- 7. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta

sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dari aspek kelembagaan juga ada sinergis antara pengelola tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2023 mengacu pada RKPD Tahun 2023 dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dari Renja Tahun 2023 yaitu **meningkatkan kualitas pendidikan**, untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten guna **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**, Tujuan tersebut diukur melalui peningkatan IPM, di mana Indeks 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan **nilai indeks pendidikan**.

2. Sasaran

Sasaran renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu:

a) Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan dengan sasaran **Meningkatnya Derajat Pendidikan**. Indeks Pendidikan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS). Untuk mencapai target IPM dan meningkatnya derajat pendidikan berikut indikator yang digunakan:

- Rata-rata Lama sekolah;
- Harapan Lama Sekolah;
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun;
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun.

b) Urusan Pemuda dan Olahraga

Pada urusan pemuda dan olahraga dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga**. Untuk mencapai target indeks pemuda dan meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga berikut indikator yang digunakan:

- Persentase Pemuda Berprestasi
- persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Indeks Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Indeks pembangunan Pemuda
			Cakupan Pemuda Berprestasi
			Persentase Atlet Berprestasi
3	Meningkatkan pelayanan publik	Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengacu pada :

- Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo
- Deklarasi Sustainable Development Goals (SDGs)
- Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Dalam pencapaian program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tak lepas dari Visi dan misi Kabupaten Wonosobo yang merupakan gambaran ke depan

Kabupaten Wonosobo pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005–2025 dan RPJMN Tahun 2020–2024 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023.

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN

Berdasarkan Indikator tujuan, sasaran, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya derajat Pendidikan dan meningkatnya kualitas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, merencanakan program dan kegiatan Tahun 2024.

Adapun Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan maju Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah sesuai tabel sebagaimana tersebut dalam lampiran.

BAB V

P E N U T U P

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimana berdasarkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan minimal pendanaan urusan Pendidikan sudah sepatutnya menjadi prioritas dalam perencanaan maupun pengalokasian anggaran daerah.

Disamping itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya juga sudah menjadi ketentuan priorotas dalam perencanaan maupun alokasi anggaran daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 merupakan arahan pemerintah pusat guna mendorong peningkatan kualitas Pendidikan di daerah melalui alokasi pendanaan minimal dalam melakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas layanan Pendidikan. Dalam implementasi perencanaan maupun penganggaran tahun 2024, ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud perlu menjadi pertimbangan mengingat kondisi pendidikan di Kabupaten Wonosobo yang masih perlu banyak ditingkatkan. Perlu kebijakan dan langkah yang tepat dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat agar secara siklus perencanaan maupun penganggaran berjalan secara efektif dan tidak menjadi penghambat pada tahapan pelaksanaan.

Dalam menentukan kebijakan perencanaan maupun penganggaran, diharapkan dilakukan secara komprehensif agar peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal. Perencanaan kegiatan diupayakan sudah mengakomodasi semua kebutuhan pelayanan administratif/teknis, dan satuan pendidikan pada semua jenjang serta pendidikan nonformal/informal dalam tahun berjalan.

Selama ini kabupaten masih tergantung pada pusat dan provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan pendidikan, oleh karena itu kegiatan yang didanai APBD kabupaten sedapat mungkin bisa benar-benar terpilah yang tidak terdanai atau menunjang kegiatan provinsi maupun pusat. Dalam pembahasan alokasi anggaran aspek kemendesakan dan daya ungkit terhadap capaian kinerja pendidikan yang perlu diprioritaskan. Hal ini berkenaan dengan keterbatasan anggaran daerah sehingga harus bisa memilih kegiatan-kegiatan yang benar-benar prioritas yang mestinya bebas dari kepentingan-kepentingan politis dan aspek nonteknis pendidikan lainnya

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo membuka peluang, masukan, saran atas upaya peningkatan akses, mutu dan tatakelola pendidikan serta mengkoordinasikan dengan semua stakeholder terkait demi kemajuan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Hasil renja yang telah dibahas dalam musrenbang kabupaten menjadi dokumen resmi perencanaan tahunan. Tindak lanjut dokumen ini menjadi bahan penentuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafond anggaran sementara (PPAS).

Kegiatan yang tidak teranggarkan dalam pembiayaan APBD kabupaten akan diupayakan pendanaannya melalui APBN dan APBD provinsi, sehingga ada sinergitas agar kebutuhan pelaksanaan pembangunan pendidikan bisa terpenuhi.

Wonosobo, 24 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. TONO PRIHATONO

NIP. 197402111993031001